

## **BAB II**

### **DINAMIKA DI LAUT CHINA SELATAN**

#### **2.1. Sejarah Sengketa Laut China Selatan**

Laut China Selatan memiliki luas kurang lebih sepanjang 3.500.000 kilometer di samudera pasifik yang membentang dari selat Malaka hingga selat Taiwan. Laut China Selatan mengelilingi negara-negara pengklaim wilayah tersebut, di bagian selatan berbatasan dengan China dan Taiwan, di bagian barat berbatasan dengan Filipina dan Malaysia serta Brunei, dan dibagian timur berbatasan dengan Vietnam.<sup>1</sup> Laut ini terhubung dengan Selat Malaka dan Samudra Hindia. Perairan ini memiliki banyak pulau-pulau, tetapi terdapat dua gugusan pulau utama yaitu gugusan pulau Paracel yang berada di Selatan dan gugusan pulau Spratly yang berada di Barat. Terdapat juga beting scarborough yang terletak di sebelah Timur dan Macclesfield Bank.<sup>2</sup>

Dari segi kedalaman, perairan ini memiliki dua bagian. Pertama, *abysal plain* atau dikenal dengan sebutan Cekungan Laut China yang terletak pada bagian Utara, cekungan ini memiliki luas 1.7775.00 km<sup>2</sup> dengan kedalaman sekitar 4.300 hingga 5.016 meter. Cekungan ini memenuhi 52% dari luas keseluruhan Laut China Selatan. Kepulauan Paracel, Spratly, Macclesfield Bank, Reed Bank, dan Pratas Reef terletak pada cekungan ini. Kedua, dengan luas 1.745.000 km<sup>2</sup> memenuhi 48% luas perairan Laut China Selatan, merupakan landas kontinen Asia yang meluas sepanjang pantai China hingga ke Selatan.<sup>3</sup> Sengketa Laut China Selatan memperebutkan dua gugusan pulau utama, yaitu

---

<sup>1</sup> Evi Sulistiyani & Arianto Nugroho, pp. 2.

<sup>2</sup> Richard Q. Turcsanyi, "Chinese Assertiveness in the South China Sea" Global Power Shift. p. 31.

<sup>3</sup> Evi Sulistiyani & Arianto Nugroho, pp. 2.

kepulauan Spratly dan Paracel. Kepulauan Spratly memiliki luas kurang lebih sekitar 244.700 km<sup>2</sup> dan memiliki lebih dari 350 pulau yang sebagian besar merupakan gugusan karang. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara-negara pengklaim. Pulau ini tidak tergolong kedalam pulau yang layak dihuni tetapi menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah. Masing-masing negara mengklaim memiliki nama khusus untuk menyebutkan pulau Spratly. China menyebut Kepulauan Spratly dengan nama Nansha Quando, Filipina menyebut pulau ini dengan nama Kalayaan, dan Vietnam menamai pulau ini dengan sebutan Dao Truong Sa. Pemberian nama dari masing-masing negara tersebut menunjukkan bahwa pulau yang disengketakan adalah milik negara mereka.<sup>4</sup> Kepulauan Paracel memiliki sekitar 30 pulau dan menyebar hingga 15.000 km<sup>2</sup>. Sama seperti Kepulauan Spratly, Kepulauan Parcel juga bukan merupakan pulau yang layak untuk dihuni karena kondisi tanahnya berupa karang dan tumpukan pasir, tetapi menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kedua pulau tersebut menyimpan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati yang sangat besar.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari jenis, Laut China Selatan termasuk dalam kategori *semi-enclosed sea* (laut setengah tertutup) yang memiliki luas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup> dan dikelilingi oleh daratan serta pulau-pula sebesar 90%. UNCLOS menjelaskan apa itu *semi enclosed sea* yang diatur dalam UNCLOS 1982 Bab IX *Article* 122-123. Di dalam *Article* 122 disebutkan bahwa *enclosed sea* dan *semi enclosed sea*

---

<sup>4</sup> Nenden Nova Septiana Purbawanti, "Pengaruh Konflik Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Indonesia" Skripsi. (Bandung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS, 2016) p. 45, dalam <http://repository.unpas.ac.id/12070/>

<sup>5</sup> Nenden Nova Septiana Purbawanti, pp. 46.

adalah sebuah teluk, lembah laut, atau laut yang disekitarnya dikelilingi oleh dua negara ataupun lebih dari dua negara, dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit ataupun terdiri dari seluruhnya, terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua atau lebih negara pantai.<sup>6</sup> Seperti yang kita ketahui bahwa Laut China selatan letaknya mengelilingi negara-negara pantai pengklaim wilayah tersebut.

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah sengketa yang terjadi karena adanya perebutan wilayah dan batas-batas laut<sup>7</sup>. Sengketa telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan sampai saat ini kasus tersebut belum menemukan titik terangnya. Tumpang tindihnya klaim yang diajukan negara-negara sekitar kawasan membuat sengketa ini semakin memanas. Sengketa tersebut mengacu kepada dua gugusan pulau yaitu Paracel dan Spratly yang diperebutkan. Negara-negara yang bersengketa mengklaim Laut China Selatan atas dasar historis maupun basis geografis<sup>8</sup>.

China merupakan negara yang mengklaim Laut China Selatan atas dasar historis. Tiongkok meyakini bahwa pendahulu China sejak 2 abad sebelum masehi yaitu Dinasti Han yang menemukan pulau dan Laut China Selatan pertama kali. Berdasarkan dari hal sejarah tersebutlah yang membuat Tiongkok meluncurkan peta yang merincikan kedaulatan China atas Laut China Selatan yaitu sembilan garis putus-putus atau dikenal juga sebagai *nine-dash line*.

---

<sup>6</sup> “Laut Tertutup dan Semi-Tertutup dalam UNCLOS 1982” Jurnal Maritim (2022) dalam <https://jurnalmaritim.com/laut-tertutup-dan-setengah-tertutup-dalam-unclos-1982/> diakses pada 20 februari 2022.

<sup>7</sup> Mohammad Alvian Adi Nugroho & M. Miftahul Hikam, “ South China Sea Claim Dispute Settlement Between ASEAN and China” Trunojoyo Law Review, Vol. 2, No.1 (2020) dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/download/9478/5346>

<sup>8</sup> Muhar Junef, pp. 220.

Sembilan garis putus-putus tersebut membentuk huruf U mengelilingi wilayah perairan Laut China Selatan yang 90% wilayahnya diklaim oleh China.<sup>9</sup> Klaim yang dilakukan Tiongkok membuat negara-negara yang berlokasi disekitar perairan Laut China Selatan turut serta mengklaim wilayah perairan mereka. Sehingga menimbulkan tumpang tindihnya klaim antara negara-negara tersebut.

Pada awal 1990-an China sempat mengusulkan untuk melakukan kegiatan penelitian seismik di kawasan Laut China Selatan bersama-sama, ajakan tersebut tidak mendapatkan respon hingga pada 2003 Filipina secara diam-diam menyetujui ajakan untuk melakukan eksplorasi bersama dengan China untuk melakukan pembangunan bersama. Pada 2005 Vietnam mulai bergabung dan tindakan tersebut diketahui oleh publik dan menuai protes karena survei tersebut tidak transparan dan di curigai terjadinya korupsi. Kemudian pada 2008 perjanjian tersebut berakhir dan sejak saat itu negara-negara yang bersengketa mulai melakukan survei secara mandiri. Hal tersebut membuat mereka semakin bermusuhan dan sengketa kian memanas karena mereka saling berusaha menyabotase kegiatan eksplorasi dan menghalangi perusahaan minyak asing untuk bekerja sama.<sup>10</sup>

Pada tahun 2011 China memberlakukan larangan tegas penangkapan ikan di daerah yang disengketakan, Tiongkok juga mengerahkan kapal-kapal ke perairan untuk menjaga kawasan. China juga berupaya meningkatkan administrasi penangkapan ikan di Laut China Selatan dengan menuntut kapal-kapal asing untuk memperoleh izin dari Hainan jika ingin menangkap ikan di kawasan

---

<sup>9</sup> Evi Sulistiyani & Arianto Nugroho. Pp. 3.

<sup>10</sup> Richard Q. Turcsanyi, pp. 38.

tersebut. Tindakan pelarangan penangkapan ikan dilakukan China karena pada 2008 terjadi peningkatan jumlah kapal penangkap ikan Vietnam di dekat perairan Paracel. Lalu pada 2011 Filipina melaporkan bahwa China telah berupaya sebanyak 5 kali dalam menyabotase survei eksplorasi minyak Filipina.<sup>11</sup>

Semua tindakan yang China lakukan di perairan tersebut juga semata-mata untuk mempertahankan klaimnya, karena negara-negara yang mengklaim kawasan tersebut juga melakukan hal yang sama. Peningkatan aktivitas China dalam mempertahankan hak penangkapan ikan serta minyak, seiringan dengan peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh Filipina dan Vietnam dalam mengeksploitasi sumber daya di perairan tersebut. Filipina dan Vietnam juga meningkatkan aktivitas mereka di perairan tersebut dengan cara meningkatkan jumlah patroli. Masing-masing negara yang bersengketa berusaha menegaskan dan menunjukkan kedaulatannya.<sup>12</sup>

Memasuki era kepemimpinan presiden Xi Jinping, strategi militer yang awalnya berbasis pada kekuatan darat mulai bergeser menjadi kekuatan maritim dan menjadi kepentingan inti bagi China.<sup>13</sup> China semakin mengedepankan dan mempertegas klaim mereka di kawasan perairan tersebut dengan membangun beberapa fasilitas sipil maupun militer di pulau-pulau serta perairan yang disengketakan.<sup>14</sup> Reklamasi terus dilakukan di perairan tersebut untuk meningkatkan kondisi hidup para pekerja yang ditugaskan disana agar dan untuk

---

<sup>11</sup> Richard Q. Turcsanyi, pp. 41.

<sup>12</sup> Richard Q. Turcsanyi, pp. 43-44.

<sup>13</sup> "China's Maritime Disputes" Council on Foreign Relation (2022) dalam <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes> diakses pada 20 Februari 2022

<sup>14</sup> Weifeng Zhou, "China's Growing Assertiveness in the South China Sea" Real Insititue Elcano, dalam <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/chinas-growing-assertiveness-in-the-south-china-sea/> diakses pada 20 Februari 2022.

menjaga kedaulatan teritorial serta hak maritim. Tidak hanya China yang melakukan reklamasi di kawasan tersebut, negara-negara lain yang bersengketa juga sedang melakukan reklamasi meskipun lahan mereka tidak seluas China. Masing-masing dari negara tersebut membangun landasan terbang di lahan yang mereka reklamasi.<sup>15</sup> China berhasil menjadi negara yang memiliki infrastruktur paling maju dan mampu mendukung proyeksi militer mereka di kawasan tersebut. Pada tahun 2015 Xi Jinping membaca sebuah pidato di Singapura, ia mengatakan bahwa:

“Pulau-pula yang berada di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah China sejak zaman kuno, maka dari itu pemerintah China harus bertanggung jawab dalam melindungi kedaulatan teritorial dan maritim yang sah”

Ia juga mengatakan China akan berupaya berintegrasi lebih dekat dengan negara-negara tetangganya dan China membuka lebar jalan bagi negara-negara tetangga untuk turut serta dalam pembangunan China agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.<sup>16</sup>

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, ia ingin membangun China menjadi negara dengan kekuatan maritim, karena lautan memiliki keuntungan yang sangat strategis yang dapat membantu China dalam bersaing secara global di bidang politik, militer, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan serta teknologi. Agar kondisi maritim selalu terjaga, China memperkuat angkatan bersenjata yaitu

---

<sup>15</sup> Richard Q. Turcsanyi, pp. 51.

<sup>16</sup> Edward Wong, “Xi Again Defends China’s Claim to South China Sea Island” The New York Times, dalam <https://www.nytimes.com/2015/11/08/world/asia/xi-jinping-china-south-china-sea-singapore.html> diakses pada 10 Februari 2022.

*People's Liberation Army (PLA)*. PLA memiliki beberapa fokus yang di prioritaskan antara lain membangun militer yang kuat, menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan China, serta mewujudkan mimpi bangsa China agar mencapai pembaharuan besar Tiongkok.<sup>17</sup> PLA juga dikerahkan di wilayah Laut China Selatan untuk menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingannya. China mengerahkan PLA ke wilayah perairan tersebut karena negara-negara lain yang bersengketa juga telah memperkuat militer di wilayah mereka.<sup>18</sup> Selain memperkuat militer, pada tahun 2016 China memasang rudal yang berlokasi di Pulau Woody, pemasangan rudal tersebut semata-mata hanya untuk membentengi pertahanan serta memperkuat China dan sesuai dengan hukum internasional<sup>19</sup>

Melihat konflik yang semakin memanas, Xi Jinping mengatakan bahwa China akan berupaya meredam kasus sengketa wilayah maritimnya menggunakan jalan-jalan damai tanpa menggunakan kekuatan militer agar perdamaian dan stabilitas kawasan tetap terjaga. Tindakan tersebut ia lakukan dengan tetap mempertahankan klaim China atas Laut China Selatan dan melindungi hak serta kepentingan inti nasional China. Jalan damai yang dilakukan China adalah dengan cara melakukan kerja sama bilateral terhadap negara-negara yang berada di sekitar kawasan Laut China Selatan khususnya Filipina.

---

<sup>17</sup> Kerry Brown, "Foreign Policy Making Under Xi Jinping: The Case of the South China Sea" *Jurnal of Political Risk*, Vol. 4, No.2 February (2016) dalam <https://www.jpolrisk.com/foreign-policy-making-under-xi-jinping-the-case-of-the-south-china-sea/>

<sup>18</sup> Li Nan, "What has changed in China's South China Sea policy under Xi Jinping," *Think China*, 2020, dalam <https://www.thinkchina.sg/what-has-changed-chinas-south-china-sea-policy-under-xi-jinping> diakses pada 20 Februari

<sup>19</sup> Richard Q. Turcsanyi, pp. 52.

## 2.2. Potensi Laut China Selatan

Negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan saling memperebutkan wilayah tersebut karena menyimpan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati yang sangat melimpah yang berada di pulau-pulau, perairan, dan dasar lautan. SDA non-hayati seperti mineral, gas dan minyak mentah sangat melimpah di wilayah perairan Laut China Selatan. Berdasarkan data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik China, di perairan tersebut memiliki potensi minyak hingga 213 miliar barel dan kandungan gas alam diperkirakan sebanyak 2 quadrillion kubik per kaki.<sup>20</sup> Meningkatnya kebutuhan energi negara-negara yang bersengketa membuat mereka berlomba-lomba untuk mempertahankan klaim mereka atas Laut China Selatan agar bisa mengeksplorasi minyak dan gas yang melimpah di wilayah tersebut.

Selain sumber daya minyak dan gas yang sangat melimpah, kawasan perairan yang sangat luas ini juga menyimpan sumber daya ikan yang sangat besar. Menurut *World Wildlife Fund, Resource Scarcity in the South China Sea* pada 2015, perairan ini berhasil menyumbang kebutuhan ikan sebesar 10% secara global.<sup>21</sup> Sektor perikanan merupakan penghasilan utama Asia Tenggara dengan produksi tahunan mencapai 22,5 juta ton pada 2016 dan diprediksikan akan terus mengalami peningkatan sebesar 36,9 juta ton pada 2030 dan 51,5 juta ton pada 2050 hal ini membuat sektor perikanan di wilayah Laut China Selatan menjadi sangat penting. Laut China Selatan memiliki lebih dari 3.700 spesies ikan laut,

---

<sup>20</sup> Evi Sulistiyani & Arianto Nugroho. Pp. 9.

<sup>21</sup> David Reed, "In Pursuit of Prosperity: South China Sea Chapter Summary" dalam <http://www.worldwildlife.org/publications/in-pursuit-of-prosperity-south-china-sea-chapter-summary>. diakses pada 20 Februari 2022



kurang lebih sebesar 22% dari total spesies ikan laut yang ada di dunia.<sup>22</sup> Bagi rakyat Filipina perairan ini sangat penting guna memenuhi kebutuhan pokok mereka dimana ikan merupakan makanan utama penduduk Filipina, Laut China Selatan menyumbang sebesar 25% protein yang dibutuhkan 500 juta penduduk serta memenuhi sebesar 80% dari kebutuhan makanan masyarakat Filipina. Perairan ini menempati urutan ke 19 dalam hal produksi hasil laut dengan jumlah tangkapan sebesar 8 juta ton ikan pertahunnya.<sup>23</sup>

Selain sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat melimpah, Laut China Selatan juga merupakan jalur pelayaran yang sangat strategis. Secara geografis Laut China Selatan berada di antara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, serta dua benua yaitu Asia dan Australia. Kawasan ini merupakan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut serta menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia. Berbagai komoditas, seperti minyak bumi dan gas alam berlalu-lalang di kawasan ini. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memperkirakan bahwa sepertiga perdagangan maritim global melalui perairan ini. Pada 2018 nilai perdagangan yang melewati kawasan ini mencapai US\$ 3,7 triliun, dimana hal tersebut merupakan pendapatan tertinggi kedua di dunia setelah Selat Hormuz.<sup>24</sup> Banyaknya potensi strategis yang dimiliki kawasan perairan ini membuat para negara-negara yang bersengketa berusaha untuk tetap mempertahankan klaimnya. Seperti yang kita ketahui, sengketa Laut China

---

<sup>22</sup> Alfin Febrian Basundoro, "Aspek Geografis dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan" Citrakara Mandala 2020) dalam <https://medium.com/citrakara-mandala/aspek-geografis-dalam-konflik-laut-tiongkok-selatan-1c7ea514bae8> diakses pada 20 Februari 2022

<sup>23</sup> Evi Sulistiyani & Arianto Nugroho. Pp. 9.

<sup>24</sup> Alfin Febrian Basundoro, pp. 1.

Selatan melibatkan beberapa negara yaitu China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Laut China Selatan mengelilingi negara-negara pengklaim wilayah tersebut, di bagian selatan berbatasan dengan China dan Taiwan, di bagian barat berbatasan dengan Filipina dan Malaysia serta Brunei, dan dibagian timur berbatasan dengan Vietnam.<sup>25</sup> Masing-masing negara yang bersengketa memiliki kepentingannya tersendiri yang tetap membuat mereka mempertahankan klaim atas Laut China Selatan. Salah satunya adalah melimpahnya sumber daya alam di Laut China Selatan baik hayati maupun non-hayati, yang sangat menarik bagi negara-negara yang bersengketa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, tentu saja kebutuhan energi juga meningkat, sehingga mereka berusaha untuk tetap mempertahankan klaimnya.<sup>26</sup>

### **2.3. Sejarah Hubungan China dan Filipina**

Setiap periode kepemimpinan presiden Filipina, kebijakan masing-masing presiden yang memimpin memiliki pandangan yang berbeda terhadap sengketa Laut China Selatan. Misalnya, pada masa kepemimpinan Presiden Joseph E. Estrada yang lebih mendekatkan hubungan kerja sama militer bersama dengan Amerika Serikat agar bisa menghadapi ancaman militer yang datang dari China agar bisa mempertahankan wilayah yang Filipina klaim di wilayah Laut China Selatan. Begitu juga dengan masa kepemimpinan Presiden Gloria Macapagal Arroyo yang melihat bahwa menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat

---

<sup>25</sup> Evi Sulistiyani & Arianto Nugroho. Pp. 2.

<sup>26</sup> Dimas Fajri Nugroho, "Sengketa yang Terjadi di Laut China Selatan dan Dampaknya Terhadap Hubungan Internasional" Januari (2022) dalam [https://www.researchgate.net/publication/357526689\\_SENGKETA\\_YANG\\_TERJADI\\_DI\\_LAUT\\_CINA\\_SELATAN\\_DAN\\_DAMPAK\\_NYA\\_TERHADAP\\_HUBUNGAN\\_INTERNASIONAL.>](https://www.researchgate.net/publication/357526689_SENGKETA_YANG_TERJADI_DI_LAUT_CINA_SELATAN_DAN_DAMPAK_NYA_TERHADAP_HUBUNGAN_INTERNASIONAL.>)

dapat memperkuat sistem pertahanan Filipina dan melindungi Filipina dari sikap agresifitas China di Laut China Selatan.<sup>27</sup>

Pada masa kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III, Filipina masih bersikap konforntatif terhadap China, dimana Filipina menganggap sengketa Laut China Selatan tidak dapat diselesaikan dengan kerja sama bilateral dan pada tahun 2013 melayangkan gugatan arbitrase secara sepihak ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Hasil gugatan arbitrase tersebut keluar pada 2016 dan dimenangkan oleh Filipina, tetapi putusan tersebut di bantah oleh China. Tiongkok sangat menolak tindakan intervensi dari pihak ketiga, menurut China Pengadilan Arbitrase Internasional tidak memiliki hak atas sengketa yang terjadi di wilayah Laut China Selatan, karena wilayah tersebut merupakan kedaulatannya. Tiongkok menekankan bahwa wilayah kedaulatan China merupakan suatu hal yang sah dan tidak dapat di tawar.<sup>28</sup>

Kemudian, pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte terdapat suatu perubahan besar dimana Filipina menjadi lebih terbuka dan mau bekerja sama dengan China. Duterte memiliki beberapa kepentingan yang ingin ia capai, yaitu ingin melindungi keamanan dan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional Filipina. Meskipun sengketa masih terjadi, China dan Filipina mengesampingkan permasalahan tersebut dan mulai melakukan kerja sama bilateral. Duterte lebih memilih jalan damai untuk meredam sengketa dengan China karena tidak ingin

---

<sup>27</sup> Gerald Damping, "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodgrigo Duterte Terhadap China dalam Konflik Laut China Selatan" *Journal of International Relations*, Vol. 6, No.4 (2020), p 621 dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/28836/24471>

<sup>28</sup> Firdaus Amir, Sri Yuniati & Abubakar Eby Hara, "Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan" *E-SOSPOL* Vol. 5, edisi 2, 2017, p 90, dalam <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/5713/4256/>

menghadapi konflik yang lebih besar lagi, bahkan Duterte mengurangi kerja sama dengan Amerika Serikat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Gerald Damping, pp 622.